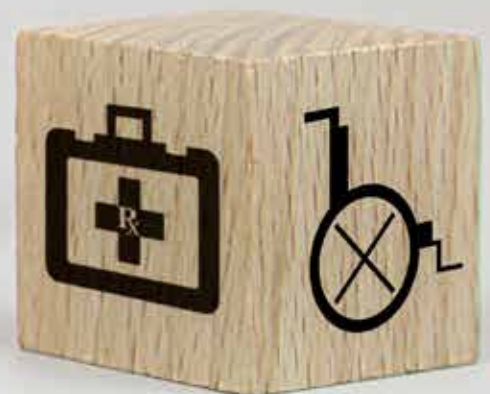




MATRIKS

Irisan Antara Isu Sorotan
Komnas HAM RI Mengenai
COVID-19 dengan Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan



Matriks Irisan Antara Isu Sorotan Komnas HAM RI Mengenai COVID-19 dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan¹

Penanggung Jawab: Sandrayati Moniaga (Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komisi Nasional Hak Asasi Manusia / Komnas HAM)

Wakil Penanggung Jawab: Mimin Dwi Hartono (Koordinator Bidang Pengkajian dan Penelitian)

Koordinator Peneliti: Alghiffari Aqsa

Wakil Koordinator Peneliti: Andhy Panca

Peneliti Utama: Roy Thaniago dan Hamong Santoso

Asisten Peneliti Utama: Okta Rina Fitri, Ronny Josua Limbong, Fidela Gracia

Peneliti Pendukung: Handa S. Abidin

Editor: Bayu Imantoro

Desain dan Ilustrator: Aditya Megantara

Penerbit:

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)
Jalan Latuharhary No. 4B Menteng, Jakarta Pusat 10310.
Telepon (021) 392 5230 Fax (021) 392 2026

**Komnas HAM
2021**

¹ Matriks ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari: “Penelitian: Peran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Hak Asasi Manusia dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia” (2021). Data dalam matriks ini dibuat berdasarkan analisis tim peneliti atas “Tata Kelola Penanggulangan COVID-19 dalam Perspektif HAM”.

Tujuan TPB ²	Target TPB ³	Isu Terkait ⁴
<u>Tujuan 1</u> Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun.	5. Membangun yang dibutuhkan dan layanan keuangan termasuk keuangan mikro daya tahan dan kesiapan masyarakat miskin dan kelompok rentan menghadapi perubahan iklim, krisis lingkungan, ekonomi, sosial, dan bencana. 3. Di tingkat nasional mengimplementasikan sistem dan ukuran perlindungan sosial yang tepat bagi semua level masyarakat. Tahun 2030 berhasil memberikan perlindungan yang substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	Pemberian perlindungan sosial kepada masyarakat seperti Program Kartu Prakerja tidak sesuai kebutuhan Lambannya dan tidak tepat sasarannya bantuan langsung pemerintah kepada masyarakat
<u>Tujuan 2</u> Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan.	1. Pada tahun 2030, mengakhiri kelaparan dan memastikan adanya akses bagi seluruh rakyat, khususnya mereka yang miskin dan berada dalam situasi rentan, termasuk bayi, terhadap pangan yang aman, bernutrisi dan berkecukupan sepanjang tahun	Lambannya dan tidak tepat sasarannya bantuan langsung pemerintah kepada masyarakat
<u>Tujuan 3</u> Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia.	8. Mencapai cakupan layanan kesehatan universal, termasuk lindungan risiko finansial, akses terhadap layanan kesehatan dasar yang berkualitas dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin yang aman, efektif, berkualitas dan terjangkau bagi semua	Sarana dan prasarana tidak merata dan tidak terdistribusi dengan baik, misal Alat Pelindung Diri (APD), tidak memenuhi hak warga mengakses fasilitas kesehatan

² Lihat: Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (ditetapkan 4 Juli 2017, diundangkan 10 Juli 2017) (selanjutnya: Perpres 59/2017), beserta Lampirannya.

³ Lihat: Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia untuk SDGs/TPB, <https://www.sdg2030indonesia.org/>.

⁴ Isu terkait adalah hasil kategorisasi atau temuan yang dilakukan penelitian ini dengan mempertemukan TPB dan Rekomendasi Komnas HAM.

Tujuan TPB ²	Target TPB ³	Isu Terkait ⁴
		Hak atas kesehatan bagi narapidana difasilitasi melalui keputusan Menkumham SK nomor M.HH-19.PK.01.04.04
		Hak penyandang disabilitas: • Tiadanya pendataan tentang jumlah penyandang disabilitas • Penolakan perawatan bagi penyandang disabilitas dikarenakan tiadanya tenaga medis yang bisa menangani
d. Memperkuat kapasitas di setiap negara, khususnya di negara berkembang untuk peringatan dini, pengurangan resiko dan manajemen resiko kesehatan nasional dan global		• Lambannya pemerintah dalam menetapkan status darurat kesehatan • Adanya dualisme status kedaruratan (kedaruratan kesehatan masyarakat dan darurat bencana non-alam secara nasional) sehingga kebijakan penanggulangan tidak terkonsolidasi dan tidak maksimal • Tidak dilaksanakannya kebijakan Karantina Wilayah, melainkan PSBB • Tidak menyeluruhnya PSBB di Jakarta karena tidak membatasi mobilitas dari dan ke Jakarta • Perbedaan pemberlakuan di tiap daerah; tidak terkoordinasi dengan pemerintah pusat • Komunikasi mengenai kebijakan yang distorsif dan tidak terpusat • Sulitnya transportasi untuk menyalurkan bantuan • Tidak adanya data yang terpusat mengenai RS rujukan yang membutuhkan bantuan

Tujuan TPB ²	Target TPB ³	Isu Terkait ⁴
<u>Tujuan 4</u> Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.	1. Pada tahun 2030, memastikan bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan primer dan sekunder yang gratis, setara dan berkualitas, yang mengarah pada hasil belajar yang relevan dan efektif	Proses pendidikan dari rumah diapresiasi Komnas HAM RI dalam hal imbauan untuk menghadirkan kondisi belajar yang menyenangkan, namun menyisakan problem (a) akses internet yang belum merata, baik dalam hal infrastruktur maupun kemampuan ekonomi siswa miskin dan di daerah terpencil (b) menambah beban pekerjaan bagi orang tua siswa
	2. Pada tahun 2030, memastikan bahwa semua anak perempuan dan laki-laki mendapat akses terhadap pengembangan masa kanak-kanak secara dini yang berkualitas, juga pengasuhan dan pendidikan pra-dasar agar mereka siap untuk masuk ke pendidikan dasar	
	3. Pada tahun 2030, memastikan akses yang setara bagi semua perempuan dan laki-laki terhadap pendidikan tinggi, teknis dan kejuruan yang berkualitas dan terjangkau, termasuk universitas	
	5. Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan dan memastikan akses yang setara terhadap semua tingkatan pendidikan dan <i>training</i> kejuruan bagi mereka yang rentan, termasuk yang memiliki disabilitas, masyarakat adat dan anak-anak yang berada dalam situasi rentan	Kurangnya dukungan program bagi siswa difabel dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
	a. Membangun dan meningkatkan mutu fasilitas pendidikan yang sensitif terhadap gender, anak dan disabilitas dan menyediakan lingkungan belajar yang aman, tanpa kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua	
	c. Pada tahun 2030, secara substansial meningkatkan penyediaan guru-guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional untuk pelatihan guru di negara-negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang dan negara berkembang kepulauan kecil	Kurangnya kompetensi guru dalam proses pembelajaran daring

Tujuan TPB ²	Target TPB ³	Isu Terkait ⁴
<u>Tujuan 8</u> Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua	8. Melindungi hak-hak pekerja dan mendukung lingkungan kerja yang aman bagi seluruh pekerja, khususnya bagi perempuan buruh migran, dan pekerja dalam situasi genting	Program Kartu Prakerja yang tidak sesuai kebutuhan Pelanggaran atas hak pekerja: • PHK sepihak atau besaran pesangon yang merugikan buruh • Ancaman terpapar virus (kewajiban tetap masuk kantor, tiadanya protokol yang memadai di kantor, dll) Hak dan fasilitas bagi tenaga medis belum memadai: • Kelangkaan APD • Jam kerja yang berlebih • Insentif yang kecil • Tingginya tingkat kematian tenaga medis
<u>Tujuan 9</u> Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi.	a. Memfasilitasi pembangunan infrastruktur yang tahan lama dan berkelanjutan di negara-negara berkembang melalui dukungan finansial, teknologi dan teknis yang diperbanyak untuk negara-negara Afrika, negara kurang berkembang, negara berkembang terkungkung daratan dan negara berkembang kepulauan kecil c. Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi dan berupaya untuk menyediakan akses yang universal dan terjangkau terhadap internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020	Penggunaan teknologi informasi dalam penanggulangan COVID-19 belum maksimal dan belum terpadu

Tujuan TPB ²	Target TPB ³	Isu Terkait ⁴
	3. Meningkatkan akses industri skala kecil dan usaha skala kecil lainnya, khususnya di negara-negara berkembang terhadap layanan pendanaan, termasuk kredit yang terjangkau dan digabungkan dengan value chains dan pasar	Tidak adanya data yang terpercaya mengenai jumlah UMKM yang kegiatan ekonominya terdampak COVID-19
<u>Tujuan 16</u> Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.	3. Mendukung perangkat hukum di tingkat nasional dan internasional dan akses keadilan yang sama untuk semua	Tidak kuatnya legalitas pemerintah dalam melaksanakan pembatasan dan pengurangan HAM yang bertujuan melindungi kesehatan publik
	6. Membangun institusi-institusi yang akuntabel dan transparan di semua level	Tidak ditentukannya masa berlaku masa kedaruratan, dan ini tidak sesuai dengan prinsip pembatasan HAM
	7. Memastikan pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di semua level	Pelibatan TNI dalam pelaksanaan PSBB di 4 provinsi dan 25 kota/kabupaten tidak sesuai dengan pokok tugas TNI (hal. 122)
		Penertiban pelaksanaan protokol kesehatan melalui pembatasan, denda, dan pembubaran kerumunan dimaklumi Komnas HAM RI sebagai langkah yang harus diambil Polri. Meski dalam beberapa kasus, penangkapan warga yang berkerumun dikritik masyarakat sipil karena tidak adanya dasar hukum
		Hak warga atas informasi terbaik karena: • Tidak sinkronnya data antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah • Kualitas data yang meragukan • Tidak menghitung PDP atau ODP yang meninggal meski belum di-swab test (hal. 27)
		Keamanan data pasien COVID-19 yang diretas melanggar hak privasi

